

**STATUS KEWARISAN DALAM SISTEM KEKERABATAN
MASYARAKAT BALI AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten
Mesuji)**

Skripsi

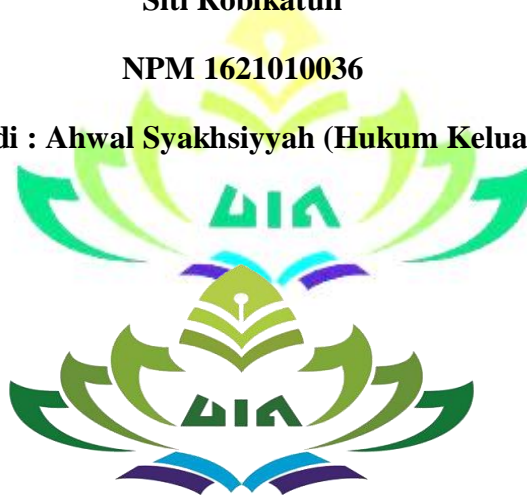
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 (SH) dalam Ilmu Syariah**

Oleh

Siti Robikatun

NPM 1621010036

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

STATUS KEWARISAN DALAM SISTEM KEKERABATAN MASYARAKAT BALI AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten
Mesuji)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana S1 (SH) dalam Ilmu Syariah**

Oleh

Siti Robikatun

NPM 1621010036

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Pembimbing 1: Drs. H. Chaidir Nasution,M.H.

Pembimbing II: Relit Nur Edi,S.Ag.,M.Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian skripsi ini adalah adanya masyarakat Bali di desa Bukoposo asli keturunan Bali beragama Hindu, yang mengalami anaknya pindah agama Islam karena faktor pernikahan. Dalam Sistem kekerabatan masyarakat Bali berdasarkan Keturunan dan agama, dengan demikian hak waris akan gugur apabila tidak patuh pada orang tua dan mengkhianati agama leluhur (nenek moyang), namun pada prakteknya orang tua masih memberikan harta warisan kepada anaknya yang pindah agama Islam. Dari persoalan ini penulis meneliti bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah Agama dan bagaimana status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat perpindahan agama menurut hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu dari lapangan dan sekunder adalah yang berasal dari buku tentang sistem kekerabatan dan kewarisan. Metode yang digunakan adalah metode interview atau wawancara langsung kepada narasumber yaitu orang Bali yang mengalami anaknya pindah agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama Islam di desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan untuk mengetahui bagaimana status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat perpindahan agama menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem kekerabatan Masyarakat Bali akibat pindah agama berpengaruh dalam kewarisan, karena pindah agama dipandang berkhianat pada agama leluhur (nenek moyang). Oleh karenanya hak warisnya menjadi gugur. Namun kenyataan di masyarakat Bali masih tetap memberikan hak waris pada anaknya yang berpindah agama atas dasar hubungan biologis (keturunan). Status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama menurut hukum Islam yaitu hak warisnya gugur menurut hukum Islam adalah sejalan, karena dalam hukum waris Islam perbedaan agama menjadi salah satu faktor gugurnya hak waris mewarisi. Sebagai alternatif untuk mendapatkan harta keluarga yang beda agama maka solusinya dengan wasiat wajibah atau hibah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Robikatun
NPM : 1621010036
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Status Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali Akibat Perpindahan Agama Menurut Hukum Islam** (Studi Kasus Di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 14 Agustus 2020

**METERAI
EMPEL**

7B2CBAFF737098422

**6000
EMPEL RUPIAH**

Siti Robikatun

NPM. 1621010036



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Status Kewarisan Dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Bali Akibat Perpindahan Agama Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

Nama : Siti Robikatur

NPM : 1621010036

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP. 195802011986031002

Pembimbing II,

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196905011998030103

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Status Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali Akibat Perpindahan Agama Menurut Hukum Islam (Studi Kaus di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”** disusun oleh **Siti Robikaturun**, NPM.1621010036 Program Studi **Al Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Irwantoni, M.Hum

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Penguji III: Relit Nur Edi, S.A.g., M.Kom.I

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Dr. H. Khairudin, M.H.
NIP. 196201011993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(Q.S. Al-Hujurat:13)



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi ini. Skripsi ini saya ucapkan atas dasar rasa bentuk syukur dan ucapan terima kasih kepada yang mendoakan saya agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku ayah dan ibuku, A.Katmo dan Supiyah terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih yang tiada terhingga motivasi serta semangat yang selalu engkau berikan kepada abakmu, sehingga anakmu dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga ini menjadi titik awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia karena anakmu dapat menyelesaikan tugas akhir pada Strata 1 ini.
2. Kepada saudara kandungku kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat yang luar biasa agar segera terselesaikan skripsi ini
3. Kepada saudara-saudariku semua terimakasih atas doa, motivasi serta semangat kalian saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.
4. Kepada seluruh guru dan dosen dari bangku SD sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu, nasehat, motivasi guna terselesainya skripsi ini.
5. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Siti Robikatun, dilahirkan di Bukoposo pada tanggal 12 juni 1997, anak ke empat dari pasangan Ahmad Katmo dan Supiyah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bukposo dan selesai pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010, setelah lulus dari SDN 1 Bukoposo penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Way Serdang yang dimulai tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Setelah Lulus dari SMPN 1 Way Serdang penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Way Serdang dimulai tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung yang dulu masih IAIN, dengan jalur SPAN-PTKIN yang masuk pada fakultas syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung,
Yang Membuat,

Siti Robikatun

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpah rahmat serta Inayah-Nya yang karena-Nya penulis di berikan kesehatan,kekuatan, dan kesabaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini . Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan junjungan kita suti tauladan kita Habibana ya Nabiana Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah ke jaman yang terang benderang seperti saat ini ,dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya Yaumul Qiyamah Amin Allah Humma Amin.

Pengajuan skripsi ini di tujukan sebagai pemenuhan kelulusan pada jenjang strata 1 di bidang ilmu syariah Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung .Penyusunan skripsi ini tentunya tidak berjsln mulus ,namun banyak sekali hambatan dan kesulitan ,berkat binaan dan dukungan dari semua pihak ,akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan ,dorongan semangat dari berbagai pihak .Untuk itu saya selaku penulis skripsi ini mengucapkan banyak trimaksih atas bantuan uang di berikan kepada saya semoga Allah SAW memberikan imbalan ,karena itu saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I., selaku ketua Jurusan Akhwal-Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution,M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan demi selesainya penulisan skripsi ini.

5. Bapak Relit Nur Edi,S.Ag.,M.Kom.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tuaku ayah dan Ibu, A.Katmo dan Supiyah cinta, terimakasih atas doamu, didikanmu, kasih sayangmu, motivasi serta semangat yang selalu engkau berikan kepada anakmu sehingga anakmu bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada saudara kandungku kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat yang luar biasa agar segera terselesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Syari'ah yang mendidik, dan memberikan ilmu, waktu dan layanannya dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah.
9. Kepada rekan sekelasku jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) angkatan 2016 terimakasih atas semangat dan motivasi dari kalian semua, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Swt.
10. Kepada teman seperjuanganku Gerakan Keluarga Sakinah Ayu, Alan, Indah, Ella, Yuli, Fita, Olga, dan Bella terimakasih atas canda tawa, bantuan, hiburan dan semangat yang kalian berikan kepada saya selama kuliah..
11. Kepada teman KKN Tekad Tanggamus, Alma Vivi, Eka, Rio, Alwan, Munir, Alvin, Ahmad, Sintia, Afrida, dan Rahma terima kasih atas 40 hari yang sangat mengesankan.
12. Kepada masyarakat Bali dan para pasangan suami-istri Bali muslim, dan tokoh adat yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian yang saya lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung,

Siti Robikatun

Npm:1621010036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengesahan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Kekerabatan.....	17
1. Pengertian Kekerabatan dan Dasar Hukum Kekerabatan	17
2. Kekerabatan Dalam Islam	22
B. Kewarisan	28
1. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Warisan	28
2. Rukun dan Syarat kewarisan	32
3. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Waris	34
4. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam	37
5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	41
6. Wasiat Wajibah	43
7. Hibah	48
8. Kewarisan Beda Agama dalam Pandangan Islam.....	49

C. Kajian Pustaka.....	56
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali Akibat Pindah Agama.....	69
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	67
A. Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali Akibat Pindah Agama.....	67
B. Status Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali.....	69
Akibat Pindah Agama Menurut Hukum Islam.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang di bahas adalah “Status Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali Akibat Perpindahan Agama Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji). Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Status Kewarisan

Status kewarisan adalah posisi atau kedudukan dalam pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.

2. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Hal ini mencakup berbagai tingkat hak dan kewajiban diantara orang-orang sekerabat yang membedakan hubungan mereka dan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat.¹

¹P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 160.

3. Masyarakat Bali

Masyarakat merupakan individu yang hidup bersama dalam suatu tatanan pergaulan, yang tercipta karena individu melakukan hubungan dan interaksi dengan individu yang lainnya. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang waktu cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.² Masyarakat Bali merupakan masyarakat mayoritas yang tinggal di Pulau Bali, yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti adat istiadat serta kebudayaan Bali. Masyarakat Baki yang dimaksud disini adalah masyarakat asli keturunan Bali yang mengalami anaknya pindah agama Islam.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Islam.³ Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hal ini dapat dipahami

²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 106.

³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 37.

bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum fikih karena arti syara' dan arti fikih terkandung didalamnya.⁴

Dari pengertian kata yang telah dijelaskan di atas maka pengertian judul diatas, dimaksud adalah bagaimana status kewarisan dalam sistem kekerabatan Bali akibat pindah agama Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Karena hukum waris adalah salah satu hukum yang berperan penting dalam masyarakat yang perlu dikaji. Hukum waris menerangkan status kewarisan dan pembagian warisan.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswi di jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah yang meliputi hukum keluarga dimana sistem kekerabatan adalah bagian dari kajian perkuliahan hukum adat.
- b. Desa Bukoposo banyak suku Bali yang beragama (masuk) Islam, sementara diantaranya masih minimnya pemahaman masyarakat Bali muslim khususnya tentang sistem kekerabatan dan kewarisan, sehingga dapat saja menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Kemudahan untuk mencari data di desa Bukoposo Kecamatan Way serdang Kabupaten Mesuji.

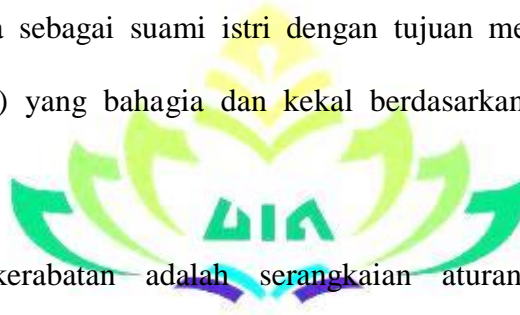
⁴Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)* Eds, Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 9.

- d. Penulis memiliki keyakinan dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini.

C. Latar Belakang

Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan bersama bagiannya masing-masing. Serta terdapat rukun dan syarat mewarisi. Siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan.

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Hal ini mencakup berbagai tingkat hak dan kewajiban diantara orang-orang sekerabat yang membedakan hubungan mereka dan orang-orang yang tidak tergolong sebagai kerabat⁵

Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah sejumlah orang yang dapat dihubungkan satu sama lainnya melalui hubungan darah yang bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama.

Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan

⁵P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 160.

keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.⁶

Perkawinan merupakan sunnah nabi, yaitu mencontohkan tindak laku nabi Muhammad s.a.w. oleh karena itu bagi pengikut nabi Muhammad yang baik maka mereka harus kawin. Selain mencontoh tindak laku nabi Muhammad, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami dan isteri

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Namun ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau itsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Perkawinan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan

⁶Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 49.

⁷Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

⁸Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001), h. 14.

bertujuan untuk membentuk keluarga yang *akinah*, *mawaddah*, dan *warrohmah*.⁹

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi. Perkawinan disyariatkan semenjak dahulu dan hal ini banyak sekali terdapat di dalam ayat Al-Quran.

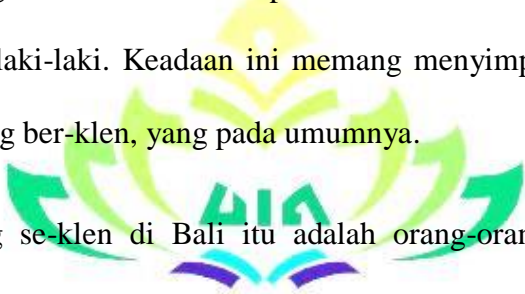
Perkawinan menurut agama Hindu (Diambil dari buku karangan Max Muller jilid 25 yang berjudul: *The Law of Manuals*). Perkawinan menurut istilah Hindu sering disebut “WIWAHA”. Dalam perkawinan itu diatur secara khusus dalam kitab undang-undang agama Hindu yang dikenal dengan nama “*Mawana darma Satwa*”. Undang-undang itu sama dengan Weda yang kedudukannya sebagai sumber hukum yang mengatur hubungan antara manusia.¹⁰

Tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah menolong membebaskan arwah nenek moyang atau orang tuanya dari kawah neraka yang di sebut “PUT”. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari keluarga tersebut “PUTRA” Yang artinya membebaskan arwah orang tua dari kawah Put itu.

⁹*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: RhedBook Publisher, 2008), h.506.

¹⁰Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 29.

Perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali, karena pada saat itulah ia dapat dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, dan baru sesudah itu ia memperoleh hak-hak dan kewajiban seorang warga komunitas dan warga kelompok kerabat. Menurut anggapan adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem klen-klen (dadia) dan sistem kasta (wangsa), maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga se-klen, atau setidaknya diantara orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Demikian perkawinan adat di Bali itu bersifat endogami klen, sedangkan perkawinan yang di cita-citakan oleh orang Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang saudara laki-laki. Keadaan ini memang menyimpang dari lain-lain masyarakat yang ber-klen, yang pada umumnya.



Orang-orang se-klen di Bali itu adalah orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama, serta juga dalam kasta, sehingga dengan berusaha untuk kawin dalam batas klennya terjalalah kemungkinan akan ketegangan-ketegangan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar kasta yang berbeda derajatnya.

Masyarakat Bali di desa Bukoposo dalam penelitian ini adalah masyarakat asli keturunan Bali beragama Hindu, yang mengalami anaknya pindah agama Islam karena faktor pernikahan. Sistem kekerabatan masyarakat Bali berdasarkan Keturunan dan agama. Karena jika pindah agama dianggap tidak patuh pada orang tua dan mengkhianati agama leluhur (nenek moyang) maka dengan itu berpengaruh dengan hak waris

mewarisi yaitu warisnya gugur. Walaupun pada prakteknya orang yang pindah agama Islam masih diberi harta warisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Status Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali Akibat Perpindahan Agama Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”**. Dimana penyusun mencoba mencari jawaban untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memfokuskan kepada status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama Islam di salah satu desa di kabupaten Mesuji.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama?
2. Bagaimana status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat perpindahan agama menurut hukum Islam?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama Islam di desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan untuk mengetahui bagaimana status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat perpindahan agama menurut Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan kajian mengenai status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama Islam karena faktor pernikahan
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama.
- b. Untuk mengetahui bagaimana status kewarisan masyarakat Bali akibat perpindahan agama menurut Hukum Islam.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹¹ Metode yang dapat digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Filed Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dikancan sebenarnya atau lapangan obyek penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang status kewarisan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bali akibat pindah agama. Pada penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

¹¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21.

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹²

2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang didalamnya terdapat masyarakat keturunan Bali yang mengalami anaknya pindah agama karena faktor pernikahan kemudian masuk Islam ketika melangsungkan pernikahan. Penelitian ini diajukan langsung kepada masyarakat Bali yang mengalami anaknya pindah agama Islam. Dalam penelitian ini orang Bali asli yang menjadi narasumber dalam menjelaskan suatu pertanyaan yang akan peneliti tanyakan terkait masalah yang akan diteliti guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum mengerti tentang sistem kekerabatan Bali yang berpengaruh dalam kewarisan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan/¹³ Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

¹²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2001), h.18.

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).¹⁴ Artinya sumber data tersebut dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Data primer ialah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu masyarakat Bali di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi.

a. Observasi

Dalam pengumpulan data, peneliti perlu melakukan observasi langsung yang dapat menjadi tolak ukur data yang akan diproses.

¹⁴Sukandarrumidi Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 20.

Peneliti mengunjungi langsung lokasi penelitian dengan mengamati berbagai hal dan kondisi di lapangan

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara ini ditujukan kepada Tokoh adat Bali dan orang Bali yang mengalami anaknya pindah agama Islam karena faktor pernikahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan ,transkrip,buku surat kabar,majalah prasati dan lain sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.¹⁵ Adapun populasi yang ditentukan dalam menyusun skripsi ini berupa data sistem kekerabatan masyarakat Bali Muslim yang berdomisili di desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Berdasarkan hasil survei Masyarakat Bali Muslim di Bukoposo sekisar 15-22 KK.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 70.

- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampel dimana sampel dipilih diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.

Dengan ciri-ciri :

1. Orang keturunan Bali asli
2. Mengalami anaknya yang pindah Agama Islam
3. Anaknya pindah agama karena faktor pernikahan.

Dalam skripsi ini penyusun menentukan sampel pada masyarakat Bali sebanyak 5 orang.

6. Teknik Pengolah Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁷ Berkaitan dengan skripsi ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Penulis dalam mengolah data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD* (Bandung:Alfabeta. 2016), h. 80.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 245.

terkumpul. Setelah data-data hasil penelitian itu terkumpul diperiksa dan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penyusun, apakah data itu benar-benar yang diteliti atau ada ebagian data yang tidak berpengaruh dalam masalah yang sedang diteliti, atau ada data yang kurang dalam proses penelitian, maka dari itu dilakukan pemeriksaan data.

- b. Recontruksi data (rekonstrukting) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan. Logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ketika data itu sudah terkumpul dan diperiksa data itu lengkap baru disusun supaya data itu mudah dipahami oleh penyusun atau yang membacanya.
- c. Sistematisi data (sistematising) yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Data ini disusun sesuai permasalahan yang sedang diteliti oleh penyusun berdasarkan urutan masalah yang diteliti..

7. Analisis data

Proses analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting yang harus dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh

¹⁸Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107.

suatu kebenaran atau ketidakbenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.

Data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisis dapat memperoleh jawaban yang sebenarnya. Analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kekerabatan

1. Pengertian Kekerabatan dan Dasar Hukum Kekerabatan

a. Pengertian

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam dalam struktur sosial. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya.¹⁹ Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar.

Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah.²⁰ Kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan atau *linege* dan garis keturunan atau *descent*. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal.

¹⁹Suriyaman Masturi Pide, *HUKUM ADAT Dahulu, kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 51.

²⁰Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h.75.

Sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak”.

Dari beberapa devinisi kekerabatan, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial, yang merupakan sebuah jaringan hubungan kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinann. Berdasarkan hubungan darah dapat diambil pengertian bahwa seseorang dinyatakan sebagai kerabat bila memiliki pertalian atau ikatan darah dengan seseorang lainnya.

b. Dasar Hukum

Ayat-ayat yang berkaitan dari sistem kekerabatan yaitu sebagai berikut: Q.S. An-Nisa' ayat: 22-23, dan 24.²¹

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَالرِّبَاطُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ

²¹Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 63.

لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
 تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سورة النساء
 : ٢٢-٢٤)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, beriklanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. Sistem Kekerabatan

Bentuk kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan. Sedangkan dalam biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan manusi

melalui pernikahan umum disebut sebagai *hubungan dekat* daripada keturunan (juga disebut *konsanguitas*).²²

Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan.²³ Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban diantara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada dengan orang asing, seperti bakti anak.

Pada umumnya dikenal 3 (tiga) bentuk sistem keturunan, yaitu :

1) Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebabakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal itu terdapat di daerah adat orang Batak, orang Bali, dan orang Ambon.²⁴

²²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h.5.

²³Adon Nasrullah Jamaludin, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah* (Bekasi: jurnal el Harakah Vol.17 No.2, 2015), h. 31.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2000), h.21.

2) Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan matrilineal dimakud yang terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang Kerinci, dan orang Semendo.²⁵

3) Parental

Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu, yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan pihak ibu ke atas. Bilateral atau parental ini terdapat di daerah orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, orang Bugis, dan orang Kaili.

Walaupun ada variasi dari ketiga bentuk sistem keturunan tersebut, misalnya: Altemerend patrilineal ordenning atau altemating patrilineal sistem, seperti di Rejang Lebong Lampung Papadon. Demikian juga ada dubble unilateral sistem seperti di timor. Tetapi tidak begitu menonjol dan tidak akan dibicarakan dalam tulisan ini.

²⁵Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 26.

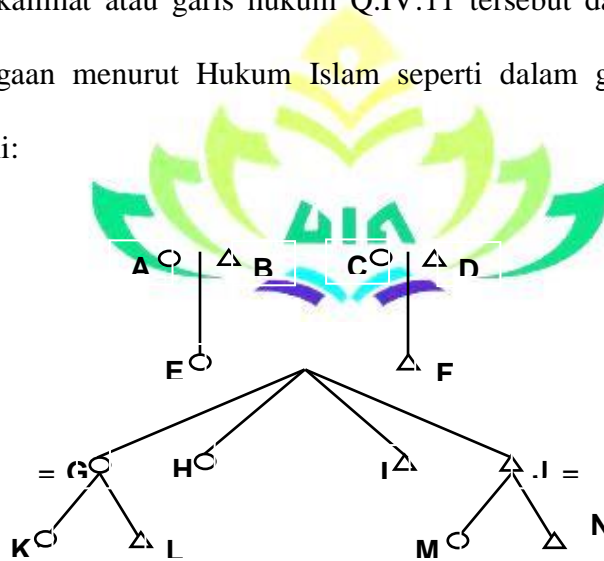
2. Kekerabatan Dalam Islam

Apabila dikaji dan dialirkan garis hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا (سورة النساء: ١١)

Artinya: Ibu bapakmu dan anak-anakmu, tidak tahu engkau siapa dari mereka itu yang terlebih dekat kepadamu dalam penilaian kegunaannya.

Dari kalimat atau garis hukum Q.IV:11 tersebut dapat ditarik sistem kekeluargaan menurut Hukum Islam seperti dalam gambar sebagai di bawah ini:

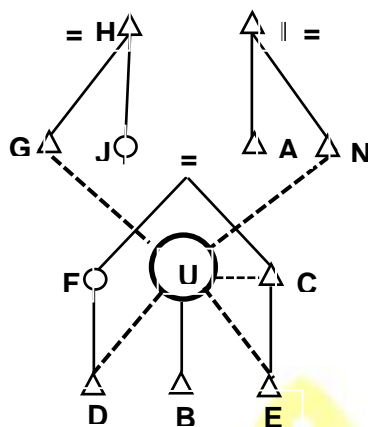


A adalah ayah dari E, sedangkan B adalah ibu dari laki-laki E, C ayah dari F, dan D ibu dari perempuan F. Antara laki-laki E menikah dengan perempuan F maka lahirlah 4 (empat) orang anak 2 (dua) laki-laki E menikah dengan perempuan F maka lahirlah 4 (empat) orang anak 2 (dua) laki-laki G dan H, 2 (dua) anak perempuan I dan J. Keempat-empatnya

adalah cucu baik dari A, B, maupun dari C, D. Sedangkan G menikah memperoleh anak laki-laki K dan anak perempuan L yang berarti cucu dari laki-laki E dan perempuan F demikian juga J setelah menikah memperoleh seorang anak laki-laki bernama M dan seorang anak perempuan bernama N. Kesemuanya dari mulai A,B,C,D,E, dan F keluarga karena hubungan sababiyah atau karena perkawinan, sedangkan antara A dengan E dan B dengan E hubungan nasabiyah atau hubungan darah. Demikian juga antara F dengan C, D dan F dengan D adalah hubungan nasabiyah (hubungan Darah) N, H, I, J, K, L, M, N, mempunyai hubungan darah masing-masing dengan E dan F. Hal ini berarti mereka menarik hubungan darah secara parental dari K, L, M, dan N sampai kepada kedua kakek dan neneknya A+B dari pihak Bapak (E), dan ke pihak kakek dan nenek (C+D) dari pihak ibu (F). Itu sistem parental yang dituangkan dari Firman Allah surat An-Nisa' ayat 11.

Ketegasan menarik garis keturunan secara parental ini akan lebih tampak lagi dengan menafsirkan Al-Quran surat An-Nisa' ayat 23 dan 24, tentang larangan-larangan dan kebolehan perkawinan.

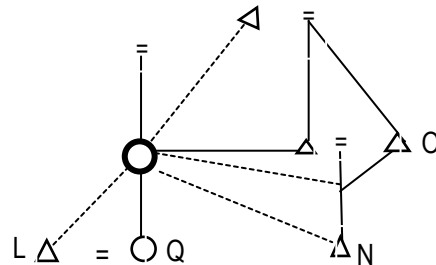
Dari Al-Quran surat An-Nisa' ayat 23 (Q. IV:23) bila digambarkan terlihat larangan-larangan perkawinan sebagai berikut pada gambar 1.



U adalah seorang laki-laki muslim, ia dilarang menikahi ibu kandungnya (A). Menikahi anak kandungnya yang bernama (B), dilarang menikahi saudara kandungnya yang perempuan (C), menikahi keponakan kandungnya dari saudara kandung perempuan (E), demikian juga dilarang menikahi keponakan kandung dari saudaranya yang laki-laki kandung (D), menikahi saudara sekandung ayah (G), saudara sekandung ibunya (N).

Tentu saja secara tersirat dilarang menikahi ibu dari ibunya atau nenek (I), dan menikahi ibu dari ayahnya (H). Termasuk ke dalamnya larangan menikahi ibu tirinya (J), berdasarkan Q. IV:22.

Larangan perkawinan itu menurut Q. IV:23 masih terperinci secara limitatif sebagai terlihat dalam gambar II:

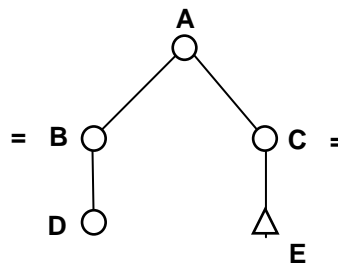


Dilarang menikahi isteri anak Shulbi atau menantu perempuan (L), mertua (M) dan anak tiri (N), dan saudara perempuan dari isteri atau O. Hal yang terlarang juga seperti gambar III berikut dibawah ini:



Dilarang menikahi P karena P ibu susuan dan R anak perempuan dari ibu susuan (P). Sedangkan menurut Q. IV:24 garis hukum pertama dilarang laki-laki muslim menikahi wanita yang telah bersuami (poliandri). Selain daripada itu *wa uhilla lakum ma waraa dzalikum*, dihalalkan bagi kamu menikahi wanita-wanita selain dari yang secara limitif dilarang (Q.IV:24). Dengan uraian di atas, maka sistem larangan perkawinan cross cousins dan parallel-cousins seperti yang terdapat dalam sistem hukum adat

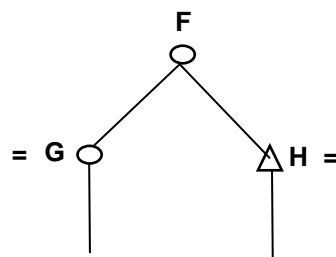
minangkabau dan adat batak dihapuskan oleh Q. IV:23 dan Q. IV:24 seperti contoh dalam gambar IV di bawah ini:



D anak laki-laki dari B, cucu dari A, menurut hukum Islam boleh menikah dengan E (perempuan) anak dari C walaupun antara B dan C bersaudara kandung yaitu seibu seapak.

Sedangkan menurut hukum adat batak antara D dan E dilarang kawin, karena mereka satu marga, melanggar eksogami atau karena perkawinan demikian endogami

Kasus V:



I anak laki-laki dari perempuan G, menurut hukum islam boleh menikah dengan perempuan J anak dari H, walaupun antara G dan H bersaudara kandung satu bapak, atau seapak atau seibu saja.

Sedangkan menurut hukum adat minangkabau dilarang karena mereka se-clan atau sesuku. Di batak pun dilarang karena melanggar tutur.

Kasus VI:



Antara laki-laki N anak L cucu K menurut hukum islam boleh menikah dengan perempuan Q anak M juga cucu K, walaupun antara Bapak N dengan ibu Q bersaudara kandung. Di minangkabau perkawinan demikian dianjurkan. Tetapi di Batak dilarang karena simetris atau melanggar asimetris, walaupun antara laki-laki N dengan wanita Q tidak se-clan (tidak semarga). Keluarga N adalah Kahanggi anak Boru dan keluarga Q adalah Kahanggi Mora.

B. Kewarisan

1. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Warisan

Kata waris berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-wirsan*, isim failnya *warisun* yang artinya ahli waris.²⁶ Sedangkan maknanya waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.

Menurut Ahmad Rofiq, kewarisan dalam terminologi hukum dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁷

Jadi dapat disimpulkan kewarisan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, siapa yang berhak menerima, berapa bagiannya sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan syara'.

Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah *mawaris* yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ

²⁶Muhammad Ali Al-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 33.

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 355.

وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ثُلُثٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سورة النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ؕ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

ذَٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (سورة النساء: ١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن
كَانَا أُثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً

فَلِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (سورة النساء : ١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hadis

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِسَيِّ إِبْنٍ مَاتَ بِهَا بِمَسْ مِيرْتُهُ حَقْلٌ لَكَ السُّلُسُ

Artinya: Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata bahwasanya anak dari anak meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi

orang Islam.²⁸

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.”*²⁹

2. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya.

a) Rukun dalam kewarisan Islam

1) Pewaris (*Mawarits*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia.

2) Ahli waris (*Al-Warits*)

²⁸Muhammad Ali Ash Shabuni, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ‘ala Dhau’ al-Kitab wa al-Sunnah*, terjemahan oleh A. M. Basalamah Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 42-43.

²⁹Al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Mugirah ibn Bardzibahal-Bukhari *Sahih al- Bukhari*, Juz 4 (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1410/1990 M), h. 194. Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh-al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960M), h.98.

Menurut hukum Islam Al-warist adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwaris*.³⁰ dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.³¹

3) Harta warisan

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

b) Syarat dalam kewarisan Islam

1) Meninggalnya orang yang mewariskan.

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, jadi seseorang disebut *mawaris* apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian *muwaris* dibagi menjadi tiga, yang pertama, mati *haqiqi* (mati sejati),

³⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), h.36.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Butir b, h.81.

kedua, mati *hukmi* (menurut putusan hakim), ketiga, mati *takdiry* (menurut dugaan).³²

- 2) Ahli waris yang hidup baik secara haqiqi atau hukmy.

Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup

- 3) Ahli waris mengetahui status kewarisan status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, sebakpak, maupun seibu. mengetahui sebab-sebab ia mewarisi harta warisan tersebut.

3. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Waris

Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali sekiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberi bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam

³² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h.37.

kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra- putrinya, seperti suami istri. Atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak turunya. Atau dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidiknya, serta orang yang rela mengorbankan harta bendanya untuk membebaskannya dari perbudakan menjadikan dia manusia bebas yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak, seperti orang yang membebaskan budak dan lain sebagainya.

Mereka-mereka diatas mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena mereka mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Menurut para mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Al-Qur'an ada tiga.³³ Sebab-sebab itu adalah:

- a. Hubungan perkawinan, hubungan perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi memerlukan 2 syarat. Akad perkawinan itu sah menurut syariat, baik kedua suami-istri telah berkumpul maupun belum, ketentuan ini berdasarkan keumuman ayat-ayat mawaris dan tindakan Rasulullah SAW

³³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 62.

bahwa beliau “telah memutuskan kewarisan Barwa’ binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan mas kawinnya”. Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa’ dengan suaminya adalah sah. Ikatan perkawinan antara suami istri masih utuh atau dianggap masih utuh.

- b. Hubungan kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.
- c. Hubungan memerdekakan budak (wala’). *Wala’* dalam pengertian syariat adalah kekerabatan yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak, kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6.

4. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:³⁴

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, jika seseorang ahli waris membunuh pewaris dengan zalim karena hendak menguasai warisan tersebut dengan segera maka syari'at Islam telah mengharamkannya dari warisan orang yang ditinggalkan orang yang di bunuh. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada orang yang mewariskannya dengan alasan dan cara apapun, baik pembunuhan itu karena menjalankan qishas, hudud, dan selainnya; lupa atau sengaja; secara langsung atau menggunakan penyebab lain.³⁵ Para ulama' bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama' dari golongan khawarij saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadits Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut : “Tidak ada hak

³⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 208-209.

³⁵Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'I jilid 3* (Jakarta : Almahira, 2010), h. 85.

sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi”. Sedangkan ijma’ para sahabat adalah ketika Umar r.a. pernah memutuskan untuk tidak memberikan Diah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab, kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian ahli waris. Meskipun begitu, para ulama’ masih berselisih paham tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima waris.

b. Perbedaan Agama

Maksud dari perbedaan agama adalah antara yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (non muslim). Perbedaan agama seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim apapun agamanya. Perbedaan agama (non muslim) adalah penghalang untuk saling mewarisi. Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang kewarisan. Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu pula sebaliknya.³⁶

Berpijak dari hadits Nabi Muhammad

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ

³⁶Syekh Mahmud Syaltukh, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zaky al-Kaf (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), h.293.

المسلم

Jumhur ulama berpendapat seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim apapun agamanya. Pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama) ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa hadits Nabi SAW : *al Islam ya'la wala yu'la 'alaihi* (Islam unggul, tidak ada yang mengungguli).

Berkaitan dengan hak waris muslim atas harta waris dari pewaris non muslim terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama ahli hukum Islam. Mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh mewarisi harta waris dari pewaris non muslim, tetapi ada pendapat dari sebagian ulama yang membolehkan seorang muslim mewarisi harta waris dari pewaris non muslim. Pendapat yang melarang muslim mewarisi dari pewaris non muslim merupakan pandangan empat Khulafa' ar-Rasyidin, imam dari empat madzhab, dan mayoritas fuqaha yang diamalkan oleh umat Islam secara umum.

Syekh Muhyidin Syaraf An-Nawawi atau lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat (ijma') bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim.

Begitu juga menurut mayoritas ulama (jumhur ulama) dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Sebagai pengecualian ada minoritas ulama yang memperbolehkan muslim mewarisi dari non muslim, tetapi pandangan kelompok ini menurut Imam An-Nawai bukanlah pandangan yang benar (shahih).

Adapun pendapat yang membolehkan seorang muslim memperoleh harta waris dari orang kafir yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi *tirkah* orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan *al-wala'*, mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum *tirkah* dibagikan

Muadz bin Jabal, Muawiyah, Said bin Al Musayyib, Masruq dan lainnya, seperti juga Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ali bin Al Husein, Abdullah bin Ma'qil, Asy Sya'bi, An Nakha'i, Yahya bin Ya'mar, dan Ishaq. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim juga membolehkan muslim mewarisi dari non muslim Demikian juga pendapat Yusuf Al Qaradhwani. berpendapat bahwa orang muslim dapat mewaris dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya. Pendapat mereka ini berargumentasikan pada: Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Mu'az, dia berkata: Aku mendengar Nabi s.a.w.

bersabda: Islam itu lebih dan tidak kurang. Karena itu, orang muslim dapat memperoleh hak (mewaris) yang tidak diperoleh oleh orang kafir. Kedua, berdasarkan *qiyas*, mereka mengatakan bahwa orang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak diperbolehkan sebaliknya, dan diperbolehkan pula orang muslim mengambil harta *ghanimah* orang kafir. Jika kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara deduktif analogis berarti diperbolehkan pula orang muslim mewarisi harta orang kafir.³⁷

5. Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas – asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadits Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas.³⁸

a. Asas *Ijbari*

Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang

³⁷ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-A'imma al-Arba'ah*, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M), h. 52.

³⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2004), h. 16-28.

yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Asas Bilateral

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan, artinya laki-laki

mendapatkan hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang di dapat oleh laki-laki.

e. Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain itu berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.

6. Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.

Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini berdasarkan pada surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makhruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Aljashshash dalam bukunya Akhkamul Qur.an menegaskan bahwa dalam surah di atas jelas

menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis mengemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.³⁹

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat- pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur Rahman mengemukakan wasiat wajibah ini muncul karena³⁵:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang member wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat.

³⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 166.

2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini yakni kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaanya jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang disesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan

itu. Untuk mengetahui besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya ahli waris lainnya, menurut professor Hasbi Ash shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga.
- 2). Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.
- 3). Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris lain. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkan dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si

pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.

Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa apabila ada seorang anak beragama Islam mempunyai harta banyak, maka anak sebagai *al-muwarrits* diwajibkan untuk mewasiatkan (wasiat wajibah) sebagian hartanya untuk kedua orang tuanya, atau kerabatnya yang non muslim. Pandangannya ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 180, yang substansinya perintah wajib berwasiat kepada ahli waris sesama muslim secara umum. Tapi perintah ayat ini sudah dinasakh dengan turunya surat al-Nisa': 11-14. Yang masih berlaku adalah berwasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris disebabkan beda agama.⁴⁰

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Ibn Hazm al- Zhahiri yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib (*al-fardh*) hukumnya bagi setiap muslim, terutama kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris. Apabila kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya, sebagai solusi suatu wasiat wajibah untuk mereka.

⁴⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiq*, Cet. Ke 8 (Mesir: Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M), h. 230-231.

7. Hibah

Hibah merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. kriteria hibah adalah:

1. Suatu pemberian
2. Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara Cuma-Cuma
3. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup
4. Tidak dapat ditarik kembali
5. Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena terdapat satu pihak yang berprestasi.⁴¹

Nabi Saw adalah orang yang sering memberi hadiah sekaligus menerimanya. Beliau juga sering memberi dan mendapat pemberian. Hibah dan hadiah merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan.⁴² Menurut hukum syara" hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikna hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *I'arah* (pinjaman).⁴³

Bahwasannya keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk

⁴¹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 125.

⁴²Syaikh Shaleh bin Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, *Al-Mulakhkhas al-fiqhi* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 323.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid (14)*, terj, Mudzakir : Al- ma'arif, h. 167.

mendapatkan pahala akhirat, maka di namakan sedekah. Jika yang dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan yang dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah. Inilah perbedaan dari beberapa hal diatas. Kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyariatkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri. Seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya

8. Kewarisan Beda Agama dalam Pandangan Islam

Ulama ahli tafsir, Hadits, dan fiqh bersepakat bahwa perbedaan agama pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan.⁴⁴ Hal ini didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Menurut imam Asy-Syafii dan Imam Abu Hanifah, orang kafir semuanya mewarisi diantara mereka sendiri dengan mafhum dari

⁴⁴Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.77.

hadits: “orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.

Yang dimaksud dengan berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal mewarisi bukan Islam, baik agama nashrani maupun agama atheis yang tidak mengakui agama yang hak, sedang agama orang yang bakal mewarisi harta peninggalannya adalah Islam

Berbeda agama mengakibatkan tidak adanya wilayah di antara sesama mereka. Tidak adanya wilayah non Muslim terhadap seseorang Muslim¹⁰⁷. Dapat dipahami pada ayat 141 surat An-Nisaa' yang berbunyi:



الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ
وَأِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (سورة النساء: ١٤١)

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika

orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan terhadap orang-orang beriman. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama terbatas pada pergaulan dan hubungan baik, dan tidak menyangkut dengan pelaksanaan agama.

Mengingat bahwa antara hak kewarisan dengan kekerabatan mempunyai kaitan yang erat, hadits yang melarang hak kewarisan Muslim dari yang bukan Muslim terdapat perbedaan pendapat. Semua mujtahid sepakat bahwa non Muslim tidak dapat jadi ahli waris dari pewaris Muslim. hal ini sejalan dengan hadits gugurnya hak waris karena perbedaan agama dan tidak bertentangan dengan surat al-Maidah ayat 5.

Dalam hal orang Muslim mewarisi dari yang nons Muslim terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang Islam juga tidak mewarisi bagi pewaris non Muslim atau murtad.

Macam-macam berlainan agama dan pendapat-pendapat tentang hak waris mereka dapat diperinci sebagai berikut⁴⁵:

⁴⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), h.97.

a. Orang kafir mewarisi orang Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam lantaran lebih rendah statusnya dari pada orang Islam. Dalam masalah ini terdapat persoalan, bila pewaris tersebut masuk Islam sesudah matinya orang yang mewariskan, sedangkan harta peninggalan simati belum dibagi-bagikan.

1. Jumhur ulama tetap berpendapat terhalang mewarisi, lantaran timbulnya hak mempusakai itu adalah sejak kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta warissan. Padahal di saat kematian orang yang mewariskan dia masih dalam keadaan kafir, jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.
2. Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwa pewaris terebut tidak terhalang mewarisi, sebab predikat berlainan agama sudah hilang sebelum pembagian harta warisan
3. Fuqaha aliran Imamiyah berpendapat bahwa harta peninggalan itu belum menjadi milik ahli waris secara tetap sebelum dibagi-bagikan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu ia tak terhalang mewarisi.

Dari pendapat diatas pendapat jumhur yang paling kuat. Sebab apabila syarat mendapat warisan baru dimulai ketika saat pembagian harta warisan tentu hal ini akan dapat disalah gunakan

oleh ahli waris, ia hanya akan masuk islam ketika harta warisan itu belum dibagikan agar ia mendapat hak warisan, namun setelah harta sudah dibagikan mereka akan kembali murtad setelah tujuannya tercapai.

b. Orang Islam mewarisi orang kafir

Dalam hal ini ulama-ulama termashur dari golongan sahabat, tabi'in dan imam empat madzhab berpendapat bahwa orang Islam tidak mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Sedangkan menurut fuqaha Imamiyah berpendapat bahwa larangan mewarisi perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non Muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang istri yang kafir kitabiyah wafat, maka suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya

c. Orang kafir mewarisi orang kafir

Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'iyah, sesuai dengan anggapan beliau bahwa agama mereka itu ditinjau dari segi bertentangannya dengan agama Islam dianggap sebagai salah satu agama saja, menetapkan bahwa mereka saling dapat mewarisi satu sama lain, baik dengan adanya persamaan prinsip agamanya tetapi berlawanan kepercayaan, seperti yahudi dan nashrani.

Ulama-ulama yang beranggapan bahwa agama-agama selain Islam itu berdiri sendiri, misalnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Marzuq (aliran malikiyah), menetapkan bahwa mereka tidak dapat

saling mewarisi satu sama lain

d. Orang murtad mewarisi orang yang tidak murtad

Telah disepakati oleh seluruh ulama bahwa orang murtad, orang yang meninggalkan agama Islam, tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, orang kafir, maupun orang murtad juga.

Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya yang agama Islam, karena ia lebih rendah derajatnya dari pada keluarganya yang Muslim. Dari segi yang lain saling mewarisi itu merupakan suatu penyambung ruh keagamaan, sedang kemurtadan itu merupakan pemutus. Karena itu bila salah seorang suami istri murtad sebelum berkumpul, perkawinannya harus difasakh dan sebagai sanksinya ia dilarang mewarisi harta peninggalan pihak lain yang meninggal.

Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir, dikarenakan orang murtad itu dianggap tidak mempunyai agama, sedang orang kafir itu dianggap mempunyai agama sesuai dengan kepercayaannya. Dan orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang sama murtad, karena keduanya telah memutuskan hubungan penyambung ruh keagamaan.

e. Orang yang tidak murtad mewarisi orang murtad

Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa harta si murtad yang

didapatkan setelah murtad diletakkan di kas perbendaharaan negara Islam. Namun harta milik yang didapatkan sebelum murtad diperselisihkan oleh fuqaha' :

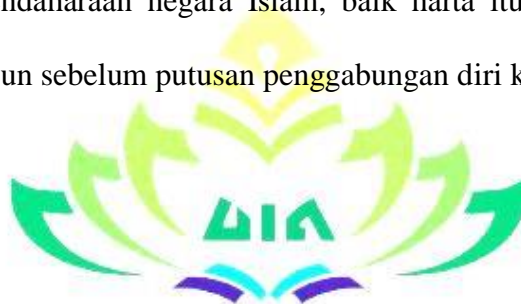
1. Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila seorang murtad mati atau dibunuh karena keriddahannya atau diputuskan oleh hakim karena ia bergabung dengan musuh, maka harta peninggalannya yang didapat ketika ia masih dalam keadaan Islam sebelum ia murtad , dan diambil biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang, di warisi oleh ahli warisnya yang Islam bila yang meninggal itu orang laki-laki murtad

Namun apabila harta yang didapatnya setelah ia murtad lalu ia mati hartanya di letakkan di kas perbendaharaan negara Islam, karena harta tersebut tidak ada yang memilikinya dan dianggap tidak ada ahli waris yang berhak mewarisi setelah murtadnya.

Bila yang murtad itu perempuan maka kematiannya tidak berdasarkan pada saat murtadnya, karena tidak dikenakan hukuman mati hanya penjara. Oleh karena itu kematiannya dihitung sejak ia mati haqiqy atau sejak ia menggabungkan dengan musuh, harta benda perempuan murtad yang didapat sebelum mati haqiqi atau sebelum diputuskan menggabungkan diri dengan musuh walaupun harta itu diperolehnya sesudah murtad diwarisi oleh warisnya yang Islam, adapun harta yang didapat sesudah putusan menggabungkan diri dengan musuh

menjadi harta kas perbendaharaan negara.

2. Ulama aliran Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, mereka tidak membedakan jenis orang yang murtad itu laki-laki atau perempuan, oleh karena itu harta yang didapat sebelum mati atau putuskan menggabungkan diri kepada musuh, walaupun hasil yang didapat setelah murtad adalah hak ahli waris yang beragama Islam.
3. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa harta benda orang murtad itu harus diletakkan di kas perbendaharaan negara Islam, baik harta itu didapat sesudah maupun sebelum putusan penggabungan diri kepada musuh.



C. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Penulis	Judul Skripsi	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Essi Hermaliza	Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan	Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh	Menunjukkan keunikan suku bangsa kluet dalam hal sistem kekerabatan. Masyarakatnya menganut sistem	Dalam skripsi ini tidak menggunakan sistem marga. Sistem kekerabatannya dilihat dari perkawinan dan warisnya.

				kekerabatan patrilineal dilihat dari penggunaan marga dan struktur keluarga luas dan peran niniak mamak dalam pelaksanaan upacara adat.	
2.	Adon Nasrullah	Sistem Kekerabatan masyarakat Kampung Sawah Di Kota Bekasi	Kampung Sawah, Kelurahan JatiMurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.	Menunjukkan masyarakat kampung sawah dalam struktur kekerabatan masyarakat kampung sawah menggunakan sistem marga. Marga yang dimaksud adalah satu bentuk pengikut keturunan mereka berdasarkan garis bapak atau ayah.	Dalam skripsi ini tidak menggunakan sistem marga. Lebih tertuju pada proses perkawinan yang berlangsung. Dan ditinjau menurut Hukum Islam.
3.	Jamaludin	Praktek Pembagian Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem	Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.	Menujukkan dalam pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem	Dalam skripsi ini praktek kekerabatannya hampir sama yaitu menggunakan sistem

		Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.		kewarisan adat patrilineal	patrilineal.
--	--	---	--	-------------------------------	--------------



DAFTAR PUSTAKA

Buku Utama

- Abidin, Amirullah Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Ali Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, *Al-Mulakhkhas al-fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013
- Al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Mugirah ibn Bardzibahal-Bukhari *Sahih al- Bukhari*, Juz 4, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1410/1990 M). Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh-al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960M
- Al-Sabuni Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah Jakarta: Gema Insani, 1996
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*, terjemahan oleh A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2001
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Madzahib al-A'imma al-Arba'ah*, Cet. Ke 1, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H./1984 M.
- Haryanto, Sukandarrumidi *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2008), h.20
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001

Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilm Ushul al-Fiq*, Cet. Ke 8, Mesir: Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H./1968 M

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: RhedBook Publisher, 2008

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014

Parman Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1995

P.N.H. Simanjuntak, S.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015

Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975

Pide Suriyaman Masturi, *HUKUM ADAT Dahulu, kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2015

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid (14)*, terj, Drs. Mudzakir, : Al- ma'arif.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD*, Bandung: Alfabeta. 2016

Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Sohari Sahrani Tihami, , *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Sosroatmodjo Arso, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Syaltukh Syekh Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zaky al-Kaf, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2004

Wulansari Dewi, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013

Zuhaili Wahbah, *Fikih Imam Syafi'I jilid 3*, Jakarta : Almahira, 2010

Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016

Jurnal



Lantowa Jafar, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali Dalam Novel 'Tarian Bumi' Karya Oka Rusmini (Kajian Antropologi-Sastra)*, Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. Vol. 1, No. 2, Oktober 2015.

Meiyani Eliza, *Sistem Kekerabatan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Antropologi-Sosial)*, Makassar: jurnal 'Al-Qalam' Vol 16 No. 26 Juli-Desember 2010

Munir Misnal, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, Yogyakarta: jurnal Filsafat, Vol,25, No. 1, Februari 2015.